

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan fungsi dan tugas negara, banyak strategi dan cara yang dilakukan oleh setiap negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat beraneka ragam untuk setiap daerah, mulai dari kebutuhan pangan maupun sandang hal ini dikarenakan letak geografis yang mempengaruhi kebutuhan pokok untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Negara mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan peningkatan taraf ekonomi daerah untuk dapat mencapai kemajuan pembangunan nasional. Tentu saja dalam hal ini, pemerintah terbatas tenaga ahli atau pun sumber daya untuk menjalankan proyek pembangunan ekonomi suatu daerah. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah ialah melakukan hubungan kerjasama internasional. Hubungan kerja sama internasional ini dikenal dengan istilah diplomatik. Istilah diploma berasal dari bahasa latin dan yunani yang dapat diartikan sebagai surat kepercayaan. Perkataan diplomasi kemudian menjelma menjadi istilah diplomat, diplomasi, dan diplomatik.¹

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Siagian (1984) bahwa keterbelakangan utama yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang adalah dibidang ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan, bahkan dapat

¹ C. S. T. Kansil dalam Syahmin, Ak., Hukum Diplomatik: Dalam Kerangka Studi Analisis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3.

dikatakan merupakan tuntutan sejarah apabila pembangunan ekonomi mendapat perhatian utama.²

Salah satu bentuk perjanjian kemitraan ekonomi yang berbentuk bilateral adalah perjanjian IJ-EPA (*Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement*). Adapun yang melandasi hubungan kerjasama ini dikarenakan pangsa ekspor Indonesia ke Jepang terlihat menurun selama periode 2000-2010 demikian pula dengan nilai investasi dari Jepang ke Indonesia cenderung menurun. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh JETRO terhadap perusahaan-perusahaan Jepang di beberapa negara, Indonesia hanya menduduki posisi ke 8 sebagai destinasi investor Jepang, sementara krisis moneter 1997 Indonesia berada diposisi 1,2 atau ke 3. Kondisi ini yang menjadi landasan bagi Indonesia dan Jepang meningkatkan hubungan kerjasama Internasional.

Kerjasama yang sangat sering dilakukan oleh negara ialah hubungan kerjasama disektor ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional terbagi dalam 4 (empat) macam yaitu, *a) kerjasama bilateral, b) kerjasama regional, c) kerjasama multilateral, d) kerjasama internasional.*

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Indonesia) melakukan hubungan kerjasama internasional dengan pihak IJ-EPA. Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap

² Sondang P. Siagian, 1984, *Pembangunan Sumber Daya Insani*, Gunung Agung, Jakarta. Hal 47.

manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah barang tentu memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau yang disingkat BAPPENAS memperkirakan Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan pembangunan Infrastruktur, jumlah dana yang diperkirakan Rp 5.519 triliun dalam periode lima tahun mulai 2015-2019.³

Adapun hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang melalui IJ-EPA ialah dalam bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kerjasama yang dilakukan ialah dalam bentuk pelatihan dan pemberian bantuan dana untuk pengembangan peningkatan usaha kecil. Hal ini dilakukan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat yang berdomisili di Jawa Barat dan salah satu program pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengurangi angka pengangguran.

Fungsi Program kerjasama pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh IJ-EPA berlandaskan pada upaya perkuatan kapasitas UMKM. UMKM partisipan program ditempatkan sebagai mitra sejajar. Capaian dari program kerjasama pengembangan UKM ini adalah menguatnya usaha UMKM peserta program ditinjau dari indikator usaha. Serta terbentuknya iklim usaha yang sehat dan positif.

Pelatihan yang diterapkan dalam kerjasama internasional ini bersifat membangun mental dengan skill untuk dapat bersaing dengan usaha yang telah ada dan memberikan peningkatan pembangunan ekonomi dikalangan masyarakat.

³ Jokowi Butuh Rp 5.500 Triliun Lebih untuk Bangun Infrastruktur Sampai 2019 www.detiknews.com di unduh pada tanggal 18 juli 2018

Bantuan – bantuan Jepang sesuai yang dijelaskan merupakan salah satu bentuk diplomasi dari Jepang kepada Indonesia. Dengan memberikan bantuan kepada Indonesia, Jepang akan lebih mudah mendekati dan mempertahankan hubungan dengan Indonesia terutama dalam hal perdagangan.

Untuk mempertahankan perdagangan dan investasi dengan Indonesia, Jepang sangat menonjolkan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi Jepang terhadap Indonesia dituangkan kedalam IJEPA (Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement) dan IJSD (forum Indonesia – Japan Steel Dialog) dan ODA (Official Development Assistance).

IJ-EPA atau yang juga dikenal dengan nama (Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement) merupakan bagian dari formula kebijakan pemerintahan Jepang. Pada dasarnya tujuan besar dari konsep IJ-EPA adalah mendukung liberalisasi dengan cara memperkuat hubungan ekonomi regional dan bilateral itu sendiri. Jepang membuat sebuah model kerjasama seperti demikian dikarenakan untuk menjaga dominasi Jepang di Asia Tenggara. Hal ini dilakukan Jepang karena muncul kekuatan baru di ASEAN yang menjadikan bergesernya kekuatan Jepang sebagai negara yang sangat penting untuk ASEAN. China dan India muncul sebagai salah satu kekuatan besar yang muncul di ASEAN. Hal tersebut menjadi permasalahan untuk pemerintah Jepang terutama dalam hal perdagangan karena dengan munculnya negara – negara yang kekuatan ekonominya setara dengan Jepang akan menambah saingan Jepang itu sendiri.

EPA adalah perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi

kesepakatan.⁴ EPA merupakan kerjasama ekonomi bilateral yang mulai didirikan pada tahun 2000 dan hingga kini Jepang telah melakukan kerjasama ini dengan delapan negara, yaitu Mexico, Chile, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam dan Indonesia.⁵

Dengan adanya fasilitasi perdagangan, liberalisasi, dan kerjasama, IJEPA memberikan kepastian akses pasar yang lebih besar bagi produk – produk kedua negara terlebih lagi dengan adanya penurunan TBM (tarif bea masuk) menyebabkan Indonesia bisa memasuki pasar Jepang dengan Indonesia. Contohnya adalah dibidang perikanan, dengan adanya IJEPA, Jepang memberikan kesempatan untuk Indonesia mengimpor hasil lautnya ke Jepang.

IJEPA adalah kesepakatan yang menyeluruh dimana mengikutsertakan elemen – elemen yang sangat penting antara lain adalah pada sektor barang, jasa dan investasi kedalam perjanjian tersebut.⁶ Semenjak tiga tahun di jalankannya IJEPA, peningkatan ekspor Jepang ke Indonesia mengalami peningkatan meskipun sangat tipis yakni sebesar 0,43 % atau naik hanya 1,01 apabila tidak mengikuti IJEPA.

Hal yang paling ditakutkan pemerintahan Jepang kembali terjadi pada Jepang tepatnya pada tahun 2015, dimana Jepang mengalami defisit yang tinggi yakni sebesar 268,1 miliar yen. Hal ini terjadi karena turunnya harga yen dan

⁴ JETRO, “Bagaimana Menikmati Preferensi Tarif Melalui EPA/FTA”, dalam <http://www.jetro.go.jp/indonesia/jiepa/index.html/BrosurEPAind2009.pdf>, diakses 25 Desember 2015, Pukul 20.30 WIB.

⁵ Widiana Puspitasari, “Peranan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) dalam Mengatasi Krisis Listrik di Sumatera Utara (studi kasus: proyek pembangkit listrik panas bumi (PLTPB) sarulla di Sumatera Utara)”, dalam <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/394/jbptunikompp-gdl-widianapus-19694-9-11.babi-i.pdf>, diakses 25 Desember 2015, Pukul 20.50 WIB.

⁶ VOA.com “Defisit Perdagangan Jepang Meningkat” dapat diakses di www.voaindonesia.com/a/defisit-perdagangan-jepang-meningkat-bulan/juli/2923604.html diakses pada tanggal 26 Agustus 2018

perekonomian Jepang yang masih belum seimbang seperti sebelumnya.⁷ Keuntungan perdagangan Jepang dengan adanya IJEPA tidak lepas dari pengaruh kenaikan ataupun penurunan ekspor dan impor Jepang terhadap Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil penelitian mengenai organisasi internasional dan juga kepentingan nasional Indonesia dengan judul: **“KERJASAMA KEMITRAAN KESEPAKATAN EKONOMI INDONESIA – JEPANG TERHADAP UMKM (STUDI KASUS: PENGEMBANGAN INDUSTRI UMKM DI PROVINSI JAWA BARAT).”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana kerjasama program kesepakatan kemitraan ekonomi Indonesia – Jepang bagi pengembangan industri UMKM di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana strategi pengembangan pelaku industri UMKM di Provinsi Jawa Barat korelasinya dengan program kesepakatan kemitraan ekonomi Indonesia – Jepang?
3. Bagaimana kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat dalam program kesepakatan kemitraan ekonomi Indonesia – Jepang?

⁷ VOA.com “Defisit Perdagangan Jepang Meningkat” dapat dikases di www.voaindonesia.com/a/defisit-perdagangan-jepang-meningkat-bulan/juli/2923604.html diakses pada tanggal 26 Agustus 2018

1. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, masalah yang dibahas akan dibatasi dengan berfokus pada ***“RE-ORIENTASI SEKTOR PERDAGANGAN BAGI PELAKU INDUSTRI UMKM DI PROVINSI JAWA BARAT”***

Adapun periode yang akan diteliti dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dimana Indonesia mulai melakukan kerjasama dengan Jepang dalam kerja sama Internasional dalam bidang pembangunan ekonomi berupa peningkatan unit kerja masyarakat.

2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini ialah mengenai hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia-Jepang dalam hal Pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Barat. Titik fokus dalam rumusan masalah ini sebagai berikut :

“Sejauh mana re-orientasi pelaku industri UMKM di Provinsi Jawa Barat dan korelasinya dengan kegiatan implementasi program kerjasama kesepakatan kemitraan ekonomi Indonesia – Jepang.”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk menentukan fokus atau sasaran yang akan dicapai. Tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses kerja sama internasional antara Indonesia-Jepang dalam peningkatan Ekonomi dalam kegiatan pengembangan UMKM di daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana pengembangan UMKM yang dilakukan IJ-EPA di daerah Provinsi Jawa Barat.
- c. Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan terjadi hubungan kerja sama antara Indonesia-Jepang dalam pengembangan UMKM yang di selenggarakan oleh IJ-EPA di daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Memberikan masukan atau pertimbangan bagi pihak terkait terhadap pengadaan hubungan kerja sama internasional dalam bidang UMKM di daerah Provinsi Jawa Barat.

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan dan instansi terkait dalam mengambil suatu kebijakan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap proses peningkatan ekonomi Indonesia Jepang dalam proyek pengembangan UMKM di daerah Provinsi Jawa Barat pada tingkat masyarakat menengah.